

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOPIAN ANDUSTI**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **96378**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.372.000.000

1. Tanah Seluas 624 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 418 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV RU5 1.8 RS MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 183.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 889.978.817**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.704.978.817**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.704.978.817

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.